

**KETERLIBATAN AMERIKA SERIKAT DALAM KONFLIK ETNIS
DI IRAK PASCA REZIM SADDAM HUSEIN**

(2003-2010)

Supriadi dan Faisyal Rani

CP : 085376393392

Email : merdeka_puga@yahoo.co.id

ABSTRACT

Scenario of the future of Iraq will be a three-state "mini" which is divided into Shiite areas in the south, Sunnis in the center, and the Kurds in the north. The U.S. continues to push the conflict into latent or permanent. One of the involvement are through CIA agents infiltrated the Sunni group, which is a bomb attack against Shiite centers, which caused many casualties against the Shiites. Later, Prime Minister Ali Nur Maliki, who long lived in the U.S., and being "guided" the CIA, reply to Sunni groups, combing Sunni populated areas by using military forces, and killed so many of the Sunni and the characters.

Infiltration of the strength of political forces and groups in Iraq flow is a new strategy of CIA director Leon Panetta who served as U.S. Secretary of Defense, followed by General David Petraeus. The U.S. still maintains its presence in Iraq with more efficiently, without having to pay for thousands troops again.

Keywords: Interest, Intelligence, Invasion

Pendahuluan

Penelitian ini merupakan studi kepentingan nasional Amerika Serikat (AS) setelah jatuhnya rezim Saddam Husein di Irak. Setelah Invasi AS terhadap Irak berakhir, ternyata kepentingan AS masih belum terwujud sehingga AS perlu mengambil langkah untuk mewujudkan kepentingannya itu, langkah ini telah mengakibatkan konflik etnis yang berkepanjangan di Irak.

Konflik etnis di Irak memiliki keunikan tersendiri, di mana konflik yang terjadi merupakan kompleksitas antara faktor-faktor internal Irak dan juga intervensi Dunia Internasional. Secara internal. Aktor-aktor yang terlibat dalam konflik-konflik di Irak adalah aktor-aktor yang mewakili masing-masing identitas kelompoknya, baik dari suku, politik, daerah maupun aliran agama. Sementara itu, pengaruh yang berasal dari dunia internasional datang dari Amerika Serikat dan sekutunya.

Menurut **Collier dan Hoeffler**, situasi yang paling mudah memicu konflik adalah saat dua kelompok suku utama bersaing untuk memperoleh kekuasaan, seperti halnya konflik etnis yang terjadi di Irak adalah suku-suku dan kelompok-kelompok masyarakat saling berkonflik satu sama lain untuk memperjuangkan identitas politiknya yang kemudian akan berujung pada kekuasaan.¹

Pada tahun yang sama, Amerika Serikat melalui PBB memberikan tuduhan kepada Irak, bahwa Saddam Husein telah mengembangkan persenjataan nuklir dan persenjataan pemusnah massal lainnya. Sehingga, PBB menugaskan badan penyidik UNMOVIC (*United Nation Monitoring Verification and Inspection Commission*) ke Irak untuk membuktikan kegiatan pengembangan senjata nuklir dan senjata pemusnah massal lainnya.

Atas dasar penyidikan yang dilakukan UNMOVIC inilah, PBB menerbitkan resolusi No. 1441 yang berisikan penuntutan Irak untuk mengizinkan dan memberikan akses kepada UNMOVIC dan IAEA (*International Atomic Energy Association*) pada tanggal 8 November 2002.² Resolusi DK PBB inilah yang menjadi pijakan bagi Amerika Serikat untuk melakukan invasi terhadap Irak yang dimulai sejak 21 Maret 2003.

Hal ini tentu menjadi anomali dalam fenomena hubungan internasional, di mana paham demokrasi seharusnya bisa menciptakan kondisi damai dalam kehidupan masyarakat namun kenyataannya hal tersebut tidak terjadi di Irak. Intensitas konflik etnis di Irak bahkan meningkat sejak 2003 maka pertanyaan utama dalam penelitian ini adalah **“Mengapa Amerika Serikat Melibatkan diri dalam Konflik Etnis di Irak Pasca Rezim Saddam Husein?”**

Amerika Serikat ingin menanamkan pengaruhnya di Irak sehingga dapat mengatur pemerintah Irak sesuai keinginan Amerika Serikat dengan indikator:

1. Sebagai konsekuensi Invasi ke Irak dari tahun 2003 yang belum menghasilkan apa-apa.
2. Hasil Minyak Irak yang melimpah ingin dikuasai AS.
3. Pemanfaatan Kaum Syiah yang dulu tersingkirkan oleh Rezim Saddam Husein.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif yang menggunakan perspektif **neo realis**. dimana penelitian ini berusaha untuk menjelaskan tentang Menurut Charles W. Kigley dan Eugene R. Wittkop³, perspektif neorealis memandang bahwa, pertarungan posisi dan kekuasaan yang dialami oleh negara berlangsung dalam sistem yang anarkis, di mana keseimbangan teror, kesiapan dan penangkalan militer merupakan pendekatan yang dilakukan oleh negara. Dalam penelitian ini metode kualitatif tersebut tidak mengadakan perhitungan murni dan mengolah data-data angka, akan tetapi memanfaatkan data-data yang sudah ada dari berbagai sumber.

¹ Caselli, Francesco & Wilbur John Coleman. *On the Theory of Ethnic Conflict*. September 2011.

² Alhadar, Smith. *“Tidak Dapatkah Isu Irak Diselesaikan Secara Damai?”*. http://www.unisosdem.org/article_detail.php?aid=1223&coid=1&caid=45&gid=3.

³ Jemandu, Alexius, *“Politik Global dalam Teori dan Praktik”*. Yogyakarta : Graha Ilmu, 2008. Hal 45.

Data-data dalam suatu penelitian mempunyai peranan penting dalam mencari jawaban serta membuktikan hipotesa dalam sebuah penelitian. Oleh karena itu, dalam penelitian ini penulis mengumpulkan data melalui teknik *library research*. Dimana dalam teknik pengumpulan data *library research*, penulis memanfaatkan buku-buku, literatur-literatur, dan berita-berita yang berasal dari berbagai media cetak dan tulis yang valid serta informasi-informasi yang penulis peroleh melalui internet. Data yang diperoleh nantinya akan dianalisa dengan menggunakan kerangka dasar teori ataupun konsep-konsep yang ditetapkan.

Pembahasan

Irak merupakan negara republik yang di timur tengah atau asia barat daya, yang meliputi sebagian terbesar daerah mesopotamia serta ujung barat laut dari pegunungan zagros dan bagian timur dari gurun suriah. Negara ini berbatasan dengan Kuwait dan Arab Saudi di selatan, Yordania di barat, Suriah di barat laut, Turki di utara, dan Iran di timur. Irak mempunyai bagian yang sangat sempit dari garis pantai di umm qashr di teluk persia.

Irak memiliki keanekaragaman bahasa Bahasa Arab dan Kurdi adalah bahasa resmi irak dan Bahasa Asiria dan Turkmen merupakan bahasa resmi yang digunakan di beberapa daerah di irak. Etnis arab dan agama islam merupakan etnis dan agama mayoritas, sedangkan yang lainnya terdapat etnis kurdi dan sebagainya dan dari agama terdapat agama kristen dan yang lainnya. Di irak terdapat penggolongan bangsa. Bangsa tersebut digolongkan dalam 2 golongan, yaitu Syi'ah dan Sunni.

Seperti halnya negara timur tengah lainnya, irak memiliki sumber daya minyak bumi yang cukup besar, selain iran. Kerjasama antara Amerika Serikat dengan Irak dimulai pada saat Iran memutuskan hubungan dengan Amerika Serikat. Kemudian Amerika mendekati Irak dengan alasan akan membantu Irak dalam merebut daerah Iran, yang kemudian memicu terjadinya perang Irak-Iran.

Hubungan Amerika dan Irak Saat Ini

Berdasarkan kesepakatan keamanan Washington-Baghdad (SOFA) yang ditandatangani antara Irak dan Amerika Serikat pada era pemerintahan George W. Bush, seluruh tentara AS harus ditarik mundur dari Irak hingga akhir Desember 2011. Namun kini muncul keraguan soal komitmen Gedung Putih dalam merealisasikan program tersebut⁴. Alasannya karena para pejabat teras politik dan militer Amerika dalam satu tahun terakhir sangat pro-aktif berusaha meyakinkan pemerintah Irak untuk menyetujui berlanjutnya kehadiran pasukan pendudukan.

Para pejabat Gedung Putih berulang kali mengklaim bahwa penarikan mundur militer Amerika Serikat dari Irak akan menimbulkan banyak masalah bagi pemerintah Baghdad, termasuk instabilitas dan kerusuhan. Hanya segelintir pejabat Irak termasuk Kepala Staf Angkatan Bersenjata Irak, Babker Zibari, yang termakan oleh persuasi Amerika Serikat. Menurutnya, pasukan keamanan Irak tidak akan mampu mengendalikan situasi dalam negeri hingga tahun 2020 tanpa bantuan militer asing. Akan tetapi mayoritas pejabat Irak, termasuk Perdana Menteri Nouri al-Maliki berpendapat bahwa kehadiran pasukan asing sudah tidak diperlukan lagi. Pasukan pendudukan harus meninggalkan Irak sesuai jadwal yang telah ditentukan.

⁴ Cahyo, Agus. 2011. Tokoh-Tokoh Timur Tengah Yang Menjadi Antek Amerika Dan Sekutunya. DIVA Press : Jogjakarta, hal 56.

Pernyataan Obama soal penarikan mundur pasukan dari Irak bukan jaminan bahwa komitmen Amerika akan terlaksana. Para pengamat berpendapat bahwa Amerika yang hingga kini telah dengan segala cara berusaha menjustifikasi perpanjangan misi militer AS di Irak, tidak mungkin dengan mudah menarik mundur pasukannya dari negeri pendudukan itu. Bahkan para pejabat Irak sendiri meragukan komitmen Amerika dalam hal ini⁵.

Diperkirakan strategi baru Amerika Serikat lebih terfokus pada pengokohan kehadiran regional bukan hanya di Irak, apalagi masalah penarikan mundur pasukan dari Irak juga belum jelas, menyusul pernyataan Washington yang akan menambah jumlah pegawai kedutaan besarnya di Baghdad dan konsulatnya di Irak.

Strategi baru Amerika Serikat untuk Timur Tengah akan dipublikasikan dalam bulan-bulan mendatang dan ketika itulah terungkap makna dari komitmen Obama untuk menarik mundur pasukan Amerika Serikat dari Irak. Mungkin juga Amerika Serikat lebih memilih kehadiran lunak dibanding kehadiran pasukan marinirnya di Irak.

Situasi politik di negeri Irak pasca Invasi Amerika ini pun tidak akan terpisah dari kenyataan, antara para pendukung Saddam dan yang kontra terhadapnya, antara kelompok Sunni dan kelompok Syiah, antara suku Kurdi dan suku-suku lain yang merasa berhak terhadap tampuk pemerintahan Irak. Meskipun saat ini telah terdapat pemerintahan darurat dari hasil aklamasi rakyat, namun hal itu belum menunjukkan iklim yang positif terhadap suasana perpolitikan yang demokratis di Irak.

Propaganda CIA

Tahun 2003 menjadi tahun paling kelam bagi rakyat Irak karena harus berkali-kali mengalami perang berkepanjangan. Rakyat harus merasakan kerasnya dentuman bom yang dijatuhkan tentara Amerika Serikat (AS) ke rumah-rumah mereka. Merelakan anak-anak dan bayi mereka meregang nyawa oleh peluru dan pecahan granat. Bahkan sampai kini, rakyat Irak masih harus tertatih memungut serpihan-serpihan harapan yang terserak di kota-kota mati. Mereka butuh alasan kuat untuk menyerbu. Seperti biasa, tangan Amerika yang bertugas melakukan propaganda di negara lain adalah CIA (agen militer rahasia). Isunya, ada senjata pemusnah massal di Irak (nuklir). Secara rahasia, gerakan pun dimulai. Uniknya, menjelang serbuan Amerika pada 2003, mereka hanya memiliki satu orang mata-mata yang menyamar sebagai diplomat di sebuah kedutaan besar lain. Hanya satu sumber informasi yang diandalkan sebagai pendukung adalah hubungan mereka dengan *Irak National Accord* (INA), kelompok oposisi Saddam Hussein yang justru sedang berada di pengasingan.

Alhasil, bocoran informasi yang mereka berikan telah kadaluwarsa selama 4 tahun. Belum lagi sikap pimpinan INA yang memang 'mencari muka' kepada AS agar dapat berkuasa di Irak dengan cara menjatuhkan Saddam (terbukti ia menjadi Perdana Menteri Irak pada masa transisi pasca kejatuhan Saddam Hussein).

CIA mulai kehabisan cara untuk mengumpulkan informasi yang bisa menguatkan dugaan bahwa Saddam sedang merancang program senjata pemusnah massal. Pengakuan ini perlu bagi AS untuk lebih meyakinkan sekutunya. Cara lain pun ditempuh, yakni CIA memanfaatkan para keluarga ilmuwan Irak untuk mengorek informasi dari ilmuwan-ilmuwan genius Irak yang diduga terlibat dalam proyek berbahaya Saddam. Hal ini dilakukan karena

⁵ Ibid

para ilmuwan Irak yang pernah diwawancarai secara ketat oleh komisi pengawas persenjataan dari PBB mengatakan bahwa kecurigaan AS tak berdasar. Sebab, Irak telah lama menghentikan program nuklir (sejak gencatan senjata dengan Iran). Hal ini pun diakui pula oleh tiga puluh orang keluarga ilmuwan Irak yang menjadi mata-mata. Mereka melaporkan kepada CIA bahwa program pengembangan senjata biologi, kimia, dan nuklir Irak telah lama dihentikan. Gilanya, dengan alasan yang tidak jelas, CIA memilih tidak meneruskan laporan dari mata-mata itu ke Presiden. Akibatnya, Presiden Bush dan jajarannya di Gedung Putih tidak mendapatkan laporan akurat tentang kondisi sebenarnya.

David Kay, Kepala CIA yang bertugas memburu senjata pemusnah massal Irak menyatakan keluar dari CIA pada 2004. Secara terbuka ia mengakui bahwa sama sekali tidak ada senjata pemusnah massal di Irak. Kemudian, pada 2005, bos besar CIA pun mengakui bahwa mereka telah membuat kesalahan yang menjadi 'pukulan telak' bagi AS. Ratusan nyawa telah menguap bersama asap mesiu dan mesin-mesin perang. Ratusan perempuan telah menjadi janda karena para lelaki mereka telah direnggut paksa dari rumah mereka yang bersahaja. Ribuan anak telah menjadi yatim piatu. Tidak hanya rakyat Irak, tapi ribuan pasukan AS dan sekutu mati bertempur untuk alasan yang salah.

Keterlibatan Amerika Serikat Melalui CIA Pasca Invasi

Sebelum pasukan Amerika Serikat menginvasi Irak pada Maret 2003, Badan Intelijen Pusat Amerika atau CIA lebih dulu membentuk dan melatih kelompok paramiliter yang dinamakan Scorpions. Kelompok ini bertugas menghasut pemberontak pemerintahan Saddam Hussein agar terjadi kekacauan. Menurut harian *The Washington Post*, Rabu (3/8), pembentukan Scorpions disahkan langsung oleh Presiden George W. Bush pada Maret 2002 sebagai bagian dari program "pergantian rejim" di Irak.

Milisi itu direkrut dari pelarian suku Kurdi, yang kemudian dikirimkan ke sejumlah kota di Irak, termasuk Bagdad, Fallujah, dan Qaim untuk menimbulkan kesan bahwa kerusuhan sedang terjadi. Mengutip seorang pejabat intelijen Amerika, *Post* menulis bahwa latihan yang memakan biaya hingga jutaan dolar Amerika itu dibuat untuk melakukan sabotase-sabotase. Namun, sebagian besar misi unit rahasia itu kemudian dibatalkan akibat percepatan serangan Amerika ke Irak. Setelah invasi berakhir, CIA menggunakan para anggota Scorpions untuk antara lain menjadi penerjemah, membantu interogasi.

Kendali CIA terhadap Scorpions melemah setelah kekacauan membesar di Irak, pejabat intelijen lainnya menyatakan. Para milisi yang setelah perang mengenakan pakaian sipil serta mengendari kendaraan sipil itu kemudian bahkan diserang oleh tentara Amerika sendiri dengan tuduhan menciptakan kekacauan.

Dimensi baru kejahatan Amerika Serikat di Irak kian tersingkap setelah satu dekade invasi ke negara itu. Sebuah majalah Inggris baru-baru ini membongkar keterlibatan CIA dan Mossad dalam meneror para ilmuwan dan intelektual Irak. *Politic Observer* menulis, Sejak hari kedua Baghdad jatuh ke tangan pasukan asing hingga sekarang, lebih dari 5.500 ilmuwan Irak diteror oleh Dinas Intelijen Pusat AS (CIA) dan Dinas Intelijen Israel (Mossad) serta beberapa agen lokal mereka di Irak. Mossad dilaporkan secara diam-diam mengerahkan unit-unitnya untuk meneror para ilmuwan, peneliti, intelektual, dan dokter terkemuka Irak. Di samping Mossad, ada CIA yang juga memainkan peran utama dalam melakukan kejahatan tersebut.

Dalam operasinya, CIA diduga menawarkan kontrak kerja di Amerika kepada para ilmuwan Irak. Jika para ilmuwan menolak tawaran tersebut, maka agen-agen CIA akan mengintai mereka dan mengeksekusinya. Sebuah fakta mengungkapkan, Amerika sudah membentuk sebuah tim teror untuk menjalankan operasinya di Irak. Operasi itu bertujuan membersihkan Irak dari para ilmuwan dan intelektual sehingga Washington dan Tel Aviv dapat membuka jalan bagi perusahaan-perusahaan mereka untuk berinvestasi di Irak.

Pada tahun 2011, sebuah laporan menyatakan bahwa Departemen Pertahanan AS (Pentagon) dan pasukan Amerika di Irak telah bekerja sama dengan agen-agen Mossad, membunuh lebih dari 550 ilmuwan dan tokoh-tokoh akademisi pasca pendudukan Irak pada April 2003. Mossad bekerja sama dengan pasukan Amerika di Irak menewaskan 350 ilmuwan nuklir Irak dan 200 dosen universitas dari tahun 2003 hingga 2008," *International Reality*, harian Yordania melaporkan dengan mengutip sebuah laporan rahasia yang disiapkan oleh Departemen Luar Negeri AS untuk Presiden George W. Bush.

Agen CIA juga menyusup ke dalam kelompok Sunni, yang melakukan serangan bom terhadap pusat-pusat Syiah, yang menimbulkan banyak korban terhadap kelompok Syiah. Kemudian, Perdana Menteri Ali Nur Maliki, yang lama mukim di AS, dan menjadi "*binaan*" CIA itu, membalas kelompok Sunni, menyisir wilayah yang dihuni Sunni dengan menggunakan pasukan militer, dan membunuh begitu banyak penduduk Sunni dan tokoh-tokohnya⁶.

Agen CIA juga menginfiltrasi jaringan Kurdi, dan memprovokasi terhadap kelompok Kurdi, kemudian menyerang basis-basis Syiah. Konflik spiral Syiah, Sunni dan Kurdi ini, tidak akan pernah habis. Selamanya akan dipertahankan oleh AS sampai benar-benar negara Irak, menjadi jajahannya.

Infiltrasi agen-agen CIA terhadap kekuatan-kekuatan politik dan kelompok aliran di Irak merupakan strategi baru dari Direktur CIA Leon Panetta, yang sekarang menjadi Menteri Pertahanan AS, dan dilanjutkan oleh Jenderal David Petraeus. AS tetap mempertahankan kehadirannya di Irak dengan lebih efisien, tanpa harus membiayai ratusan ribu pasukannya lagi.

Minyak Irak sudah dikuasai seluruhnya oleh AS, dan dikendalikan oleh perusahaan-perusahaan minyak raksasa AS. Presiden Jalal Talabani dan Perdana Menteri Nur Maliki, tak lain, orang "*upahan*" AS, yang menjalankan semua misi kepentingan AS di Bagdad. Dua orang tokoh dari kelompok Kurdi dan Syiah ini, menjalankan skenario AS, yang melakukan pendudukan terhadap Irak, pasca penarikan pasukan AS dari negeri itu⁷.

Penarikan pasukan AS dari Irak, hanyalah politik Barack Obama, yang ingin menaikkan pamor namanya, saat menjelang kampanye presiden 2012 ini. Tidak ada yang lain. Obama ingin mengakhiri pendudukan militer terhadap Irak, karena Obama ingin lebih fokus terhadap masa jabatannya yang kedua. Irak sudah tidak diperlukan lagi perhatian yang serius, karena sudah dikuasainya. Tidak perlu mengeluarkan anggaran militer triliun dollar. Karena Irak sudah dapat ditaklukkan.

⁶ <http://www.eramuslim.com/berita/analisa/>

⁷ Ibid

Para pemimpin Irak Jalal Talabani dan Nur Maliki sudah dibawah kendali AS, dan menjalankan misi kepentingan AS di negerinya. Obama ingin memperbaiki citranya, dan memotong anggaran militer, yang akan dialihkan memperbaiki ekonomi AS, yang sudah bangkrut. Ini semuanya tujuan untuk memenangkan pemilihan presiden nanti. Obama namanya menjulang dikalangan rakyat AS, pertama berhasil membunuh tokoh yang dianggap menjadi ancaman kepentingan AS secara global, Osama bin Laden, dan kedua menggantung Saddam Husien, dan menghancurkan Irak, dan kemudian Irak menjadi bagian kepentingan AS. Membebaskan Irak memerlukan waktu yang sangat panjang, dan tokoh yang bukan boneka, seperti Jalal Talabani dan Nur Maliki.

Sekarang AS hanya tinggal menghadapi kelompok Sunni di Falujah, yang masih terus bergejolak melawan kepentingan AS di negeri itu. Semuanya akan dapat diatasi, kerjasama antara agen-agen CIA⁸, yang masih bercokol di Irak dengan mukabarat (intelijen) Irak, dan pasukan khusus Syiah dari kelompok al-Sadr, yang dapat dimanfaatkan menghadapi kalangan Sunni. Fragmentasi (pengelompokkan) berdasarkan agama dan ideologi ini, terus dipertahankan dan dikelola oleh AS dengan seksama. Ini menyangkut kepentingan jangka panjang AS di kawasan Teluk, yang sangat kaya dengan minyak. Tidak ada kepentingan lain dari AS di kawasan itu, kecuali bagaimana menguasai wilayah yang kaya minyak. Irak merupakan negara penghasil minyak terbesar kedua sesudah Saudi.

Tak ada yang dapat diharapkan dari kepergian pasukan AS dari Irak. Karena hakekatnya Irak tetap di jajah oleh AS dengan menggunakan "*tangan-tangannya*" yang ada di Baghdad, dan mereka masih tetap setia. Ini akan terus berlanjut, dan bersifat permanen.

Gerakan yang harus dibangun oleh rakyat Irak, menyingkirkan para boneka AS, yang sekarang ini mewakili kepentingan penjajah AS di Irak, yang diwakili oleh Jalal Talabani dan Nur Maliki, yang merupakan orang-orang kepercayaan AS

Keterlibatan Amerika Serikat dalam Referendum

Perjalanan Iraq pasca invasi menunjukkan pola yang sangat fluktuatif. Dari warna kekerasan terhadap tentara asing yang diyakini sebagai "penjajah" ataupun kekerasan lintas etnis, terutama dari kelompok Sunni, Syiah dan Kurdi. Perjalanan Iraq berikutnya akan sangat ditentukan oleh referendum terhadap konstitusi yang dilaksanakan 15 Oktober 2005, dan dimenangkan dengan suara 79% menerima draft Konstitusi dan 21% menolak draft.

Banyak pengamat melihat bahwa referendum di Iraq akan semakin memuluskan jalan kelompok Syiah untuk mengambil peran politik yang signifikan dalam konstalasi politik Iraq. Secara demografis, warna Syi'ah di Iraq sedemikian kental karena hampir 60% lebih penduduk Iraq adalah muslim yang bermazhabkan Syi'ah. Icon Syi'ah yang juga tidak bisa dipungkiri lagi, dari situs padang Karbala sebagai tempat syahidnya Imam Syiah ke 3, Hussein bin Ali, ataupun juga diyakini oleh kalangan Syi'ah bahwa makam Ali bin Abu Thalib sebagai Imam Syiah I juga berada di Iraq. Ulama besar Syiah juga banyak memberikan warna yang signifikan. Intelektual ekonomi Islam, Muhammad Baqir As-sadr juga besar dan berkembang di Iraq. Bahkan ulama yang sangat kharismatik Ayatulloh Ali al-Sistani merupakan ulama besar di Iraq yang dalam otoritas keulamaannya melebihi seorang *rahbah* meskipun banyak kalangan Syi'ah belum menyatakan Ali al-Sistani setara dengan Ayatulloh Khomeini sebagai seorang *marja' taklid*.

⁸ Ibid

Namun yang tidak bisa dipungkiri bahwa kekuatan politik Syi'ah sudah bisa terbaca dalam Pemilu I yang memenangkan sampai 4,075 juta suara (51%) dari total pemilih sebanyak 8,5 juta suara. Sementara itu kelompok Kurdi hanya memperoleh 2,175 suara (26%) dan Sunni hanya sekitar 1,5 juta (23%). Dan terbukti kemenangan referendum juga tidak banyak berbeda dengan pemilu sebelumnya yang mencapai 79%, hampir sama dengan pemilu tahap I, sebagai bentuk kemenangan Syiah dan Kurdi.

Ketika membandingkan dengan referendum di Iran 25 tahun yang lalu, dua hal yang kemudian direferendumkan adalah tentang bentuk negara dan identitas nasional. Dalam tradisi pemikiran Syi'ah, bentuk negara yang paling legitimate adalah Keimamahan. Namun karena ghaibnya Imam, maka Ayatollah Khomeini memberikan kesempatan pada publik untuk memilih bentuk negara yang lain. Sehingga masyarakat Iran ketika itu memilih bentuk republik untuk menggantikan bentuk monarkhi yang ditinggalkan oleh Shah Iran, Reza Pahlevi. Demikian pula dalam klausul identitas nasional, referendum memenangkan identitas Syiah Imam 12 (Syiah Itsna 'Asy'ariyyah) sebagai identitas resmi negara. Sehingga dalam banyak istilah untuk menyebut Iran ke dalam sebutan Republik Islam Syiah Iran.

Beberapa issue yang mencuat dari referendum atas tentang peranan agama dalam negara, perimbangan pengelolaan aset minyak, bentuk negara apakah menjadi negara federal ataupun jadi negara kesatuan. Dengan kemenangan ini ada kemungkinan besar sekali, Irak akan menjadi Republik Syi'ah yang ke II di dunia. Meskipun upaya ini jelas akan mendapatkan tantangan yang sangat kuat dari kelompok Sunni. Bahkan Ketua Liga Arab. Amir Mousa juga sangat mengkhawatirkan Iraq akan menjadi Republik Syi'ah karena justru akan menebar konflik yang berdimensi internal ataupun regional.

Sehingga seorang Abdul Jabbar Ahmad menyatakan bahwa Referendum hanya menimbulkan jurang pemisah lebih besar (Kompas, 26 Oktober 2005). Pandangan ini akan benar jika kelompok Syi'ah dengan kemenangan ini memaksakan diri untuk menjadikan Syi'ah sebagai dasar negara secara eksklusif. Iraq merupakan negara yang sangat multi wajah jika kita melakukan potret sejarah, ada tradisi Hamurabi dari kasanah Iraq Kuno, tradisi Mesopotamia, tradisi Sunni dari khasanah kekhilafahan Abbasiyah, dan ada pula tradisi sosialisme Baath pada era Saddam Hussein.

Sedemikian berwarna tradisi Iraq tidaklah mungkin Syi'ah akan memaksakan diri sebagai tradisi utama. Mengapa Iran bisa menjadi republik Syi'ah dan tidak menimbulkan konflik yang berarti karena dalam referendum yang dijalankan tingkat kemenangan mencapai 97,5%, sebuah angka yang mendekati mutlak. Namun di Iraq dengan kemenangan hanya 79%, atau jika lebih valid dikurangi dari suara Kurdi sebanyak 26%, maka sebenarnya kemenangan Syiah hanya sekitar 53%. Sebuah angka yang skeptis untuk menjadikan Iraq sebagai Republik Syi'ah.

Solusi Konflik Etnis di Irak

Agenda yang paling penting bagi penduduk Iraq pasca referendum ini adalah bagaimana masyarakat Iraq menghadapi musuh bersama, yakni intervensi negara besar seperti Amerika Serikat dan Inggris. Artinya saling bertikai antar anak bangsa Iraq justru akan memberikan peluang yang sangat besar bagi Amerika Serikat untuk berinvestasi politik pengaruh di Iraq. Keterlibatan Amerika Serikat di Iraq justru akan memasukkan komunitas Iraq ke dalam kubangan konflik yang tidak akan berujung pangkal.

Yang pasti Amerika Serikat akan “jengghah” dengan sendirinya jika hasil referendum memunculkan fenomena yang sangat bertentangan dengan kepentingannya. Dan sangat mungkin Amerika Serikat akan “jengghah” yang kedua kalinya, setelah dalam pemilu sebelumnya komunitas Syiah memenangkan Pemilu, dan hasil referendum juga menguatkan dominasi Syi’ah di Iraq.

Dituntut kedewasaan para politisi di Iraq, apakah dari kalangan Syiah, Sunni dan Kurdi untuk menatap masa depan dengan lebih cerah akan diuji. Kaum muslimin seluruh dunia tentunya sangat berharap “referendum” sebagai forum rekonsiliasi dan bukan sebagai forum dis-integrasi. Kedewasaan ini menjadi penting ditengah aksi boikot yang senantiasa dilakukan oleh kelompok Sunni maupun kelompok Baath dalam 2 proses demokrasi yang sudah berlangsung. Para politisi Syiah dan Kurdi harus membuka “kesempatan yang lebar” untuk mengajak komunitas Sunni dan Baath untuk terlibat dalam proses pemilu yang akan segera dilaksanakan. Sebab jika dalam pemilu nanti tingkat partisipasi masih kurang dari 70%, seperti dalam dua proses sebelumnya maka Pemilu yang akan datang juga tidak akan menghasilkan pemerintahan yang kuat. Artinya konflik dan kekerasan atas anak bangsa Iraq justru akan semakin menajam, dan siapakah yang akan mendapatkan keuntungan terbesar akibat konflik berkepanjangan adalah negara-negara besar seperti Amerika Serikat yang akan mengelola secara eksklusif Iraq. Semakin banyak investasi yang ditanam AS di Iraq, maka semakin lama pula Amerika Serikat akan mengintervensi secara masif Iraq.

Mengutip pendapat Wolter S. Jones (2003), bahwa untuk menciptakan rekonsiliasi dan integrasi di tingkat internal, kehadiran musuh bersama perlu dimunculkan. Memang dalam batas tertentu untuk menjadikan AS sebagai musuh bersama teramat sulit bagi kelompok Kurdi yang dalam konteks tradisi politik Kurdi, AS adalah mitra bahkan dewa penolong bagi eksistensi Kurdi. Atau bahkan kelompok Syi’ah-pun juga tidak bisa serta merta melakukan pengusiran terhadap AS dari Iraq karena selama ini AS telah mengkooptasi beberapa elit Syiah seperti Perdana Menteri Iyadh Alawi dan beberapa pemimpin lainnya. Kelompok yang potensial melakukan permusuhan masif adalah kelompok Sunni dan Baath yang dengan kehadiran tentara AS, kelompok ini kehilangan otoritas politik.

Kesimpulan

Amerika Serikat terlibat dalam konflik di Irak adalah untuk mewujudkan Tujuan strategis Amerika, yakni menjamin pengaruhnya secara fundamental dalam politik, pemerintahan, dan keamanan Irak. Dengan kata lain, Amerika Serikat berusaha membentuk pemerintahan Irak yang berkiblat pada sistem Amerika Serikat. Upaya ini dilakukan dengan membentuk pemerintahan transisi dari totaliter menuju demokrasi. Konflik-konflik etnis di Irak diciptakan terjadi dan lebih bersifat horizontal. Seperti konflik antara kelompok Sunni melawan Syiah, kelompok Syiah Radikal yang dipimpin oleh Muqtada Al Sadr melawan kelompok Syiah yang dikendalikan oleh Amerika Serikat, dan konflik antara orang-orang Turki, Turkmenistan dan Arab di Kirkuk (salah satu kota di Irak bagian timur).

Amerika Serikat mewariskan konflik antara Sunni, Syiah, dan Kurdi, yang terus-menerus mengoyak kehidupan rakyat Irak. Setiap hari ratusan orang tewas akibat konflik antara Syiah, Sunni, dan Kurdi. Semuanya ini di “*manage*” (dikelola) oleh *Central Intelligence Agency* (CIA), yang masih bercokol di Irak, agar negeri itu, terpecah-pecah, dan lemah. Tujuannya untuk menguasai sumber minyak yang melimpah.

Skenario masa depan Irak akan menjadi tiga negara “*mini*” yang dibagi menjadi wilayah Syiah di selatan, Sunni di tengah, dan Kurdi di utara. AS terus mendorong konflik itu menjadi laten atau permanen.

Agen CIA menyusup ke dalam kelompok Sunni, yang melakukan serangan bom terhadap pusat-pusat Syiah, yang menimbulkan banyak korban terhadap kelompok Syiah. Kemudian, Perdana Menteri Ali Nur Maliki, yang lama bermukim di AS, dan menjadi “*binaan*” CIA itu, membalas kelompok Sunni, menyisir wilayah yang dihuni Sunni dengan menggunakan pasukan militer, dan membunuh begitu banyak penduduk Sunni dan tokoh-tokohnya.

Agen CIA juga menginfiltrasi jaringan Kurdi, dan memprovokasi terhadap kelompok ini, yang kemudian menyerang basis-basis Syiah. Konflik spiral Syiah, Sunni dan Kurdi ini, tidak akan pernah habis. Selamanya akan dipertahankan oleh AS sampai benar-benar negara Irak, menjadi jajahannya.⁹

Infiltrasi agen-agen CIA terhadap kekuatan-kekuatan politik dan kelompok aliran di Irak merupakan strategi baru dari Direktur CIA Leon Panetta, yang sekarang menjadi Menteri Pertahanan AS, dan dilanjutkan oleh Jenderal David Petraeus. AS tetap mempertahankan kehadirannya di Irak dengan lebih efisien, tanpa harus membiayai ribuan pasukannya lagi.

⁹ Gunawan, Asep. *Ancaman Konflik Sunni-Syiah*, Koran Tempo Edisi 2 maret 2006

Daftar Pustaka

Buku

- Cahyo, Tokoh-Tokoh Timur Tengah Yang Menjadi Antek Amerika Dan Sekutunya. DIVA Press : Jogjakarta, Agus. 2011.
- Caselli, Francesco & Wilbur John Coleman. *On the Theory of Ethnic Conflict*. September 2011.
- Gunawan, Asep. *Ancaman Konflik Sunni-Syiah*, Koran Tempo Edisi 2 maret 2006
- Jemandu, Alexius, *“Politik Global dalam Teori dan Praktik”*. Yogyakarta : Graha Ilmu, 2008

WEB

- Alhadar, Smith. *“Tidak Dapatkah Isu Irak Diselesaikan Secara Damai?”*.
http://www.unisosdem.org/article_detail.php?aid=1223&coid=1&caid=45&gid=3.
- <http://www.erasuslim.com/berita/analisa/>